

Evaluasi Kebijakan Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 di Wilayah Jakarta Pusat = Evaluation of Tax Relief and Elimination of Administrative Sanctions Policy of Vehicle Tax Receivable for 2019 in Central Jakarta

Ogya Rum Pangestu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920558398&lokasi=lokal>

Abstrak

Kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kendaraan bermotor disahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 disebabkan oleh tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 di Kantor Samsat Jakarta Pusat, analisis hambatan pelaksanaan kebijakan, dan analisis kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam menurunkan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil evaluasi kebijakan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, bahwa pelaksanaan kebijakan ini di Samsat Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria efektif, efisien, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun tidak memenuhi kriteria kecukupan karena pada akhir 2019 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Pusat. Hambatan yang dihadapi fiskus yaitu penumpukan Wajib Pajak pada akhir periode kebijakan, Kurang Sumber Daya Manusia dan peralatan. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu antrian panjang dan membutuhkan lebih lama waktu dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa kebijakan. Selanjutnya kinerja Bapenda kurang baik dalam menurunkan tingkat piutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam menurunkan piutang dengan penerapan pengampunan pajak (penghapusan sanksi pajak) secara regular berdampak kurang baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

.....The policy of tax relief and elimination of administrative sanctions for the vehicle tax receivable ratified through the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 90 of 2019 due to the vehicle tax arrears. This descriptive research aims to evaluate the implementation of policy at Samsat Office of Central Jakarta, analysis the barriers of policy implementations, and analysis the performance of the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) in reducing the vehicle tax receivable and improving taxpayer's compliance. This research uses a quantitative approach method with post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. The Result of this study the policy implementations at Samsat Office of Central Jakarta has fulfill effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and appropriateness as proposed by William N Dunn. However, it failed fulfill the criteria of adequacy because at the end of 2019 there were still vehicle tax receivable at Samsat Office of Central Jakarta. Obstacles faced by the tax authorities are the accumulation of taxpayers at the end of the policy period, lack of human resources and equipment. Obstacles faced by taxpayers are long queues and require longer time than motor vehicle tax payments without a policy. Furthermore, Bapenda's performance is not good in reducing the level of receivables and increasing taxpayer compliance. Then one of the efforts to

reduce receivables by implementing tax amnesty (removal of tax sanctions) on a regular basis has an unfavorable impact on taxpayer compliance.